

HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA KLIPING

KLASIFIKASI : Universitas Indonesia – Penulis UI
TEMA : Optimisme di Balik Keamanan Nasional
SURAT KABAR/MAJALAH : Media Indonesia

Hari Rabu Tanggal 2 Bulan Januari Tahun 2008 Halaman 6 Kol 1-4

RINGKASAN

Kusnanto Anggoro (CLPDS UGM dan Pengajar masalah-masalah strategi dan keamanan nasional FISIP UI) menulis tentang, peningkatan sistem politik demokrasi dan berkurangnya pertikaian antar kelompok masyarakat, serta menurunnya ancaman teroris. Ketika rezim Orde Baru tumbang dan gejolak di beberapa daerah yang menuntut otonomi menyebabkan politisasi agama dan pertikaian komunal muncul di berbagai daerah. Berbagai potret buram Indonesia melalui berbagai insiden kekerasan yang terjadi, menjadi dorongan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi lebih optimis dalam membangun keamanan nasional.

CATATAN:

Optimisme di Balik Keamanan Nasional

Oleh Kurnanto Anggoro

CLPDS-UGM (Jakarta) dan pengajar masalah-masalah strategi dan keamanan nasional FISIP UI

PERISTIWA-PERISTIWA yang terjadi selama 2007 agaknya mengkuratkan optimisme: Indonesia semakin dewasa. Sistem politik demokrasi semakin mapan. Pertikaian antarkelompok masyarakat menyusut jauh jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ancaman teroris juga menyusut sampai titik yang paling rendah sejak dua tahun belakangan ini. Tidak ada lagi insiden perbatasan atau konflik semacam Ambalat yang menghangat dua tahun silam. Integritas wilayah dan kedaulatan negara agaknya bisa dibilang cukup aman. Suasana politik yang menghangat menjelang Pemilihan Umum 2009 agaknya juga tidak akan cukup membakar suasana.

Siapa pun yang rajin mengikuti perkembangan di sepanjang 2007 tidak dengan mudah melupakan tiga peristiwa penting yang menyembunyikan persoalan yang lebih fundamental. Pertama adalah insiden *cakalele* di Ambon, ketika beberapa pendukung RMS (Republik Maluku Selatan) berhasil mengibarkan bendera di depan Presiden Yudhoyono; kedua, kekerasan intraagama ketika Ahmadiyah menjadi sasaran tindak kekerasan di beberapa tempat; ketiga adalah tindak kekerasan aparat terhadap warga negara, seperti terjadi di Alas Tlogo (Pasuruan, Jawa Timur) ketika 4 nyawa harus melayang karena kebrutalan prajurit TNI-AL.

Tiga kasus itu saja merupakan potret buram Indonesia. Insiden *cakalele* menunjukkan betapa legitimasi Republik Indonesia masih menyisakan sejumlah persoalan; dan, lebih dari itu, koordinasi antara aparat negara sangat tidak memadai. Separatisme, termasuk separatisme bersenjata, agaknya tetap menjadi ancaman yang harus dipandang serius. Maluku dan Papua merupakan titik krusial karena di kedua provinsi itu masalah separatisme berbau dengan persoalan lain, khususnya sentimen komunal, keagamaan, dan keadilan dan perlakuan pemerintah pusat.

Gugatan terhadap Ahmadiyah, yang terjadi di banyak tempat merupakan sebuah potret tentang toleransi dalam kehidupan antargolongan. Identitas ganda Indonesia, sebagai negara 'seku-

ler' dengan mayoritas Islam, kerap kali menjadi titik pemicu, khususnya ketika sebagian kecil elite ingin mengendarai persoalan seperti itu untuk tujuan-tujuan politik mereka. Di mana pun juga, ikatan primordial seperti itu kerap kali menjadi titik rentan yang mudah dipolitisasi.

Alas Tlogo merupakan kasus ketika aparat negara gagal mengendalikan diri, bahkan ketika berhadapan dengan rakyat tidak bersenjata. Persoalannya tidak melulu bahwa persoalan serupa masih banyak, termasuk di Rumpin (Sukabumi, Jawa Barat), Lamarang (Banten), Melak Barong (Kutai, Kalimantan), dan Teluk Bayur (Sumatra Barat). Persoalan yang lebih serius justru jika Alas Tlogo mencerminkan bagaimana aparat negara akan bertindak ketika berhadapan dengan kasus semacam *cakalele* atau Ahmadiyah. Dapat dipastikan bahwa kekerasan negara masih tetap menjadi ancaman serius.

Tumbangannya rezim Orde Baru disertai berbagai gejala beberapa daerah yang menuntut otonomi yang lebih besar. Politisasi agama dan pertikaian komunal muncul di berbagai daerah, misalnya dalam bentuk syariat, tindak kekerasan antarkelompok, atau penolakan terhadap calon-calon dari luar daerah dalam berbagai pemilihan lokal (pilkada). Peraturan daerah tentang syariat telah diberlakukan di 32 kabupaten yang tersebar di tujuh provinsi. Distansiasi dengan yang serbabusut memang menguat, bahkan termasuk gugatan terhadap 'perjanjian internasional' dan politik luar negeri yang tetap merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Dalam *Kaji Ulang Pertahanan Strategis (Strategic Defense Review)* yang akan dipublikasikan tahun depan, Departemen Pertahanan mengidentifikasi 30 bentuk ancaman. Tiga ancaman yang

dianggap paling serius adalah ancaman yang terkait dengan disintegrasi bangsa, baik yang timbul karena ketidakpuasan kepada pemerintah pusat, radikalisme kelompok, maupun pemberontakan bersenjata. Ancaman lain, termasuk ancaman transnasional seperti terorisme dan perompakan, berada di urutan ke-15 dan ke-25—berada jauh di bawah ancaman lain seperti penyelundupan (urutan ke-7), kejahatan dunia maya dan pencucian uang (urutan ke-13). Agresi militer dari luar hanya merupakan ancaman yang tidak dianggap terlalu serius.

Wajar jika instansi seperti Departemen Pertahanan sampai pada kesimpulan seperti itu. Buku *Putih Pertahanan* yang diterbitkan 4 tahun silam memperkirakan gejala yang hampir serupa. Bahkan dapat dimengerti jika mereka cenderung konservatif dan mengandalkan pijakannya pada skenario terburuk (*worst case scenario*). Tidak perlu ada yang dirisaukan. Bahkan akan terasa janggal jika mereka menyatakan tidak ada satu pun ancaman yang dihadapi bangsa dan negara. Yang harus disimak publik dari kajian Departemen Pertahanan bukan pada persentase ancaman, melainkan pada rekomendasi mereka.

Dari sudut pandang seperti itu, salah satu gejala yang harus dinilai positif adalah bahwa Departemen Pertahanan tidak merekomendasikan kebijakan militeris. Berbeda dari anggapan berbagai pihak tentang keinginan penyatuan kembali Polri, Departemen Pertahanan justru menganggap ancaman terhadap keamanan nasional bersumber pada kemiskinan dan ketidakadilan. Indeks kewenangan Departemen dalam Negeri, Departemen Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, dan Polri justru lebih besar jika dibandingkan dengan kewenangan Departemen Pertahanan dan/

atau TNI.

Pergeseran jabatan yang terjadi di lingkungan TNI dan / atau Polri mungkin tidak banyak membawa konsekuensi politik. Pergantian Panglima TNI dari Marsekal Djoko Santoso, dan tampilnya seorang Kepala Staf TNI AD yang baru mungkin akan membawa angin konservatisme di lingkungan TNI AD. Konsekuensi paling buruk yang dapat terjadi adalah stagnasi pada reformasi internal TNI, khususnya pada masalah yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi publik di bidang finansial dan disiplin. Kecil kemungkinan militer akan memainkan peran politik, terutama pada tataran nasional.

Pengalaman di sepanjang 2007, memberi landasan yang cukup kokoh untuk mendengarkan optimisme. Ancaman dari luar hanya terbatas pada pelanggaran perbatasan oleh penyelundup, perompak, atau pelaku nonnegara lainnya. Betapa pun seriusnya, ancaman-ancaman seperti itu tidak selalu merupakan ancaman fisik terhadap warga negara. Di dalam tapal batas Indonesia, ancaman keamanan yang muncul masih berada dalam jangkauan kemampuan para aparat negara. Konflik akan tetap berada dalam kecenderungan saat ini—sporadis dan terbatas. Semakin mendekati Pemilihan Umum 2009, politisasi berbagai sentimen primordial akan semakin besar. Meski begitu, kecil kemungkinan masyarakat begitu saja mengikuti provokasi atau politisasi seperti itu.

Namun, stabilitas keamanan 2007 itu lebih bersifat *by default* daripada *by design*. Pemerintah sendiri gagal untuk melengkapi dirinya dengan kebijakan yang terarah dan terpadu. Terbengkelainya RUU Keamanan Nasional mungkin dapat membawa konsekuensi serius. Sejumlah konsep penting yang berada di dalamnya, terutama mengenai pemberian TNI kepada fungsi pemerintahan, kepolisian dan penanggulangan bencana, mungkin tidak akan terwujud. Konsekuensinya mudah ditebak, sebagian ancaman terhadap keamanan nasional masih menjadi daerah kelabu tanpa seorang pun bertanggung jawab atau sebaliknya menjadi ajang perebutan kewenangan. Tidak seorang pun tahu apakah akan ada jalan keluar ketika dalam soal itu Presiden saja enggan untuk menyuarakan kata akhir.***



■ TIKOK

W